

**PRA PERADILAN ATAS BUKTI PERMULAAN PIDANA PAJAK:
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Oleh

Mochamad Amaludin

2240057030



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2025**

**PRA PERADILAN ATAS BUKTI PERMULAAN PIDANA PAJAK:
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Mochamad Amaludin

2240057030



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga - lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Amaludin
NIM : 2240057030
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PRA PERADILAN ATAS BUKTI PERMULAAN PIDANA PAJAK: ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXI/2023” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau Terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 3 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Mochamad Amaludin
Mochamad Amaludin
2240057030



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

“Pra Peradilan Atas Bukti Permulaan Pidana Pajak: Analisis Hukum Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023”

Oleh:

Nama : Mochamad Amaludin
NIM : 2240057030
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah di periksa dan di setujui untuk di ajukan dan di pertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 3 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H)
NIDN: 0302117904

Pembimbing II

(Johnson S.M.T Pangaribuan, S.H., M.M., M.H.)
NIDK: 8957350022

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)
NIDN : 0327046303

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H)
NIDN / 0302117904



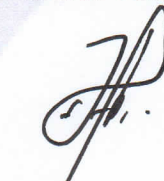
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 3 Juli 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mochamad Amaludin
NIM : 2240057030
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul “Pra Peradilan Atas Bukti Permulaan Pidana Pajak: Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023” oleh tim Penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H	Ketua	
2	Johnson S.M.T Pangaribuan, S.H., M.M., M.H.	Anggota	
3	Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Amaludin
NIM : 2240057030
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pra Peradilan Atas Bukti Permulaan Pidana Pajak:
Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2025



Mochamad Amaludin
Mochamad Amaludin
2240057030

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pra Peradilan atas Bukti Permulaan Pidana Pajak: Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Skripsi ini lahir dari keprihatinan penulis terhadap ketimpangan perlindungan hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, yang selama ini kerap dilakukan tanpa pengawasan hukum yang memadai. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, baik waktu, tenaga, maupun pemikiran. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan intelektual selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan., S.H., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas kesabaran dan ketelitiannya dalam memberikan masukan yang sangat berarti.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum, yang telah memberi dukungan administratif dan akademik selama masa studi.

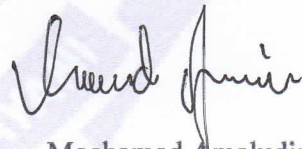
5. Bapak Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan berharga saat sidang skripsi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang diberikan selama proses perkuliahan.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada keluarga tercinta. Kepada Ayahanda dan Almarhumah Ibunda, terima kasih atas doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terhingga. Kepada istri tercinta dan anak-anak yang selalu menjadi penyemangat utama dalam setiap langkah, terima kasih atas cinta, kesabaran, dan pengertian yang tak ternilai.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perpajakan, dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 03 Juli 2025



Mochamad Amaludin

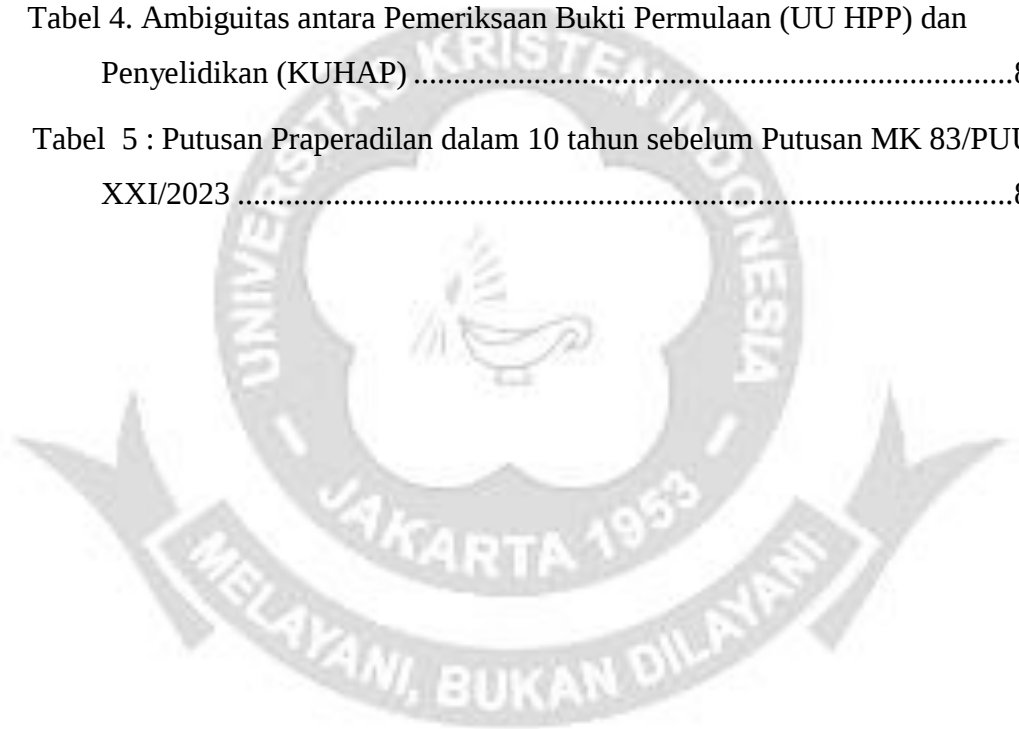
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
VISI DAN MISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iiiv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Kerangka Teori.....	37
B. Tinjauan Konseptual	57
BAB III MEKANISME PRAPERADILAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM ATURAN PERUNDANG UNDANGAN	76
A. Pengaturan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan	ix

Perpajakan (UU HPP) dan Ketentuan Teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor: 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan.....	76
B. Mekanisme Praperadilan untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pajak	83
C. Ambiguitas Norma dan Ketidakpastian Hukum	86
BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 83/PUU-XXI/2023 TERHADAP PRAPERADILAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN	101
A. Analisis Putusan	101
B. Analisis Penulis perihal Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU-XXI/2023 Terhadap Praperadilan Pemeriksaan Bukti Permulaan di Lapangan	107
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Perihal Keabsahan Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan	3
Tabel. 2 : Perbandingan antara Bukti Permulaan untuk Tindak Pidana Umum, Perpajakan, dan Khusus Lainnya	60
Tabel 3: Perbandingan Mekanisme Praperadilan di Indonesia dengan Negara Laian	71
Tabel 4. Ambiguitas antara Pemeriksaan Bukti Permulaan (UU HPP) dan Penyelidikan (KUHAP)	80
Tabel 5 : Putusan Praperadilan dalam 10 tahun sebelum Putusan MK 83/PUU-XXI/2023	82



ABSTRAK

- A Nama : Mochamad Amaludin
B NIM : 2240057030
C Bagian : Hukum Pidana
D Judul : Pra Peradilan atas Bukti Permulaan Pidana Pajak : Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023
E Halaman : i-ix 114 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran + Daftar Tabel
F Kata Kunci : Pemeriksaan bukti permulaan, tindak pidana perpajakan, praperadilan, hak wajib pajak, kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
G Ringkasan Isi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan perlindungan hak wajib pajak dalam prosedur pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak. Tahap pemeriksaan awal ini berperan penting untuk mendeteksi pelanggaran pajak, namun belum diimbangi mekanisme kontrol seperti praperadilan. Akibatnya, proses tersebut rawan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak dan mengancam asas proses hukum yang adil serta kepastian hukum bagi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pemeriksaan bukti permulaan dan peran praperadilan sebagai sarana pengawasan, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI/2023 yang menegaskan perlindungan hak wajib pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perpajakan terkait — khususnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) — serta menganalisis isi Putusan MK tersebut. Pendekatan empiris melibatkan studi kasus untuk melihat implementasi aturan di praktik.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hak wajib pajak: sebelum Putusan MK, wajib pajak tidak memiliki upaya hukum yang memadai terhadap pemeriksaan bukti permulaan, sehingga rentan dirugikan. Putusan MK No. 83/PUU-XXI/2023 berdampak signifikan dengan membuka peluang praperadilan terhadap proses ini, sehingga meningkatkan keadilan prosedural dan kepastian hukum. Kesimpulannya, diperlukan reformasi kerangka hukum (antara lain melalui revisi UU HPP dan peraturan pelaksana terkait) untuk mengadopsi prinsip-prinsip putusan MK tersebut. Penelitian ini merekomendasikan agar mekanisme praperadilan dapat diterapkan secara efektif sebagai upaya melindungi hak wajib pajak tanpa menghambat penegakan hukum pajak.

- H Daftar Acuan : 22 buku + 9 jurnal ilmiah + 4 Putusan + 2
Peraturan perundang-undangan + 4 Laporan dan
Survei + 3 sumber Lainnya (web/online)
- I Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Johnson Sahat Maruli Tua P, SH., MM., MH.



ABSTRACT

- A Name : Mochamad Amaludin
B Student Identification : 2240057030
Number (NIM)
C Section : Criminal Law
D Title : *Juridical Analysis of the Legal Position of Preliminary Evidence Examination in Tax-Related Criminal Offenses (Case Study of the Constitutional Court's Decision on Case Number 83/PUU-XXI/2023)*
E Pages : i-ix 114 Pages + References + Appendices + List of Tables.
F Key words : Preliminary evidence examination, tax-related criminal offenses, pretrial proceedings, taxpayer rights, legal certainty, Constitutional Court decision, Harmonization of Tax Law.
G Summary

This research is motivated by an imbalance in the protection of taxpayer rights during the preliminary evidence examination stage of tax crime investigations. This stage is critical for detecting tax violations but lacks oversight mechanisms such as pretrial proceedings, making it susceptible to abuse of authority by tax officials and undermining the principles of due process and legal certainty for taxpayers. The study aims to analyze the legal status of preliminary evidence examinations and the role of pretrial oversight, particularly after Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXI/2023, which reinforces the protection of taxpayer rights.

The research uses a qualitative approach combining normative and empirical legal methods. Normatively, it examines relevant tax regulations – especially the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP) – and the content of the Constitutional Court's decision. Empirically, it includes field studies through case analyses to observe implementation in practice. The findings reveal a disparity in taxpayer rights protection; prior to the Court's ruling, taxpayers lacked any legal recourse against preliminary evidence examinations, leaving them vulnerable. The Constitutional Court's Decision No. 83/PUU-XXI/2023 significantly addresses this issue by opening the possibility of pretrial oversight of the process, thereby enhancing procedural fairness and legal certainty. In conclusion, reforms to the legal framework (including revising the HPP Law and related regulations) are needed to incorporate the principles of the Court's ruling.

The study recommends implementing pretrial mechanisms effectively so as to safeguard taxpayer rights without hindering tax law enforcement.

- H *Reference* : 22 books + 9 scientific journals + 4 court decisions + 2 laws and regulations + 4 reports and surveys + 3 other sources (web/online)
- I *First Academic Advisor* : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
 Second Academic Advisor : Johnson Sahat Maruli Tua P, SH., MM., MH.

